

ANALISIS KEBIJAKAN : MENGUKUR INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)

PERTANYAAN UTAMA/PENTING

- 1) MENGAPA KUALITAS KEBIJAKAN PENTING?**
- 2) BAGAIMANA PENERAPAN IKK DIKAITKAN DENGAN EBP?**

Mengapa Kebijakan yang Baik **Penting?**



Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB,
25 November 2019

“

Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya”.

Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis.”

Tantangan Indonesia dlm Indeks Global



**Global Competitiveness
Index - Special Edition 2020**

Indikator 'Public Institutions'

Rank 18

(Skor 58,8)

dari 37 Negara

Area Perbaikan:

- Penguatan kelembagaan;
- Kebijakan dan regulasi bervisi jangka panjang;
- Inisiasi *framework* untuk transformasi digital.



**Global Talent
Competitiveness Index
2020**

Rank 65

(Skor 41,8)

dari 132 Negara

Area Perbaikan:

- Keterampilan dan pengetahuan global (*global knowledge*);
- Keterampilan profesional (*professional skill*);
- Kualitas riset dan inovasi.



THE WORLD BANK

**Government
Effectiveness Index
2019**

Rank 73

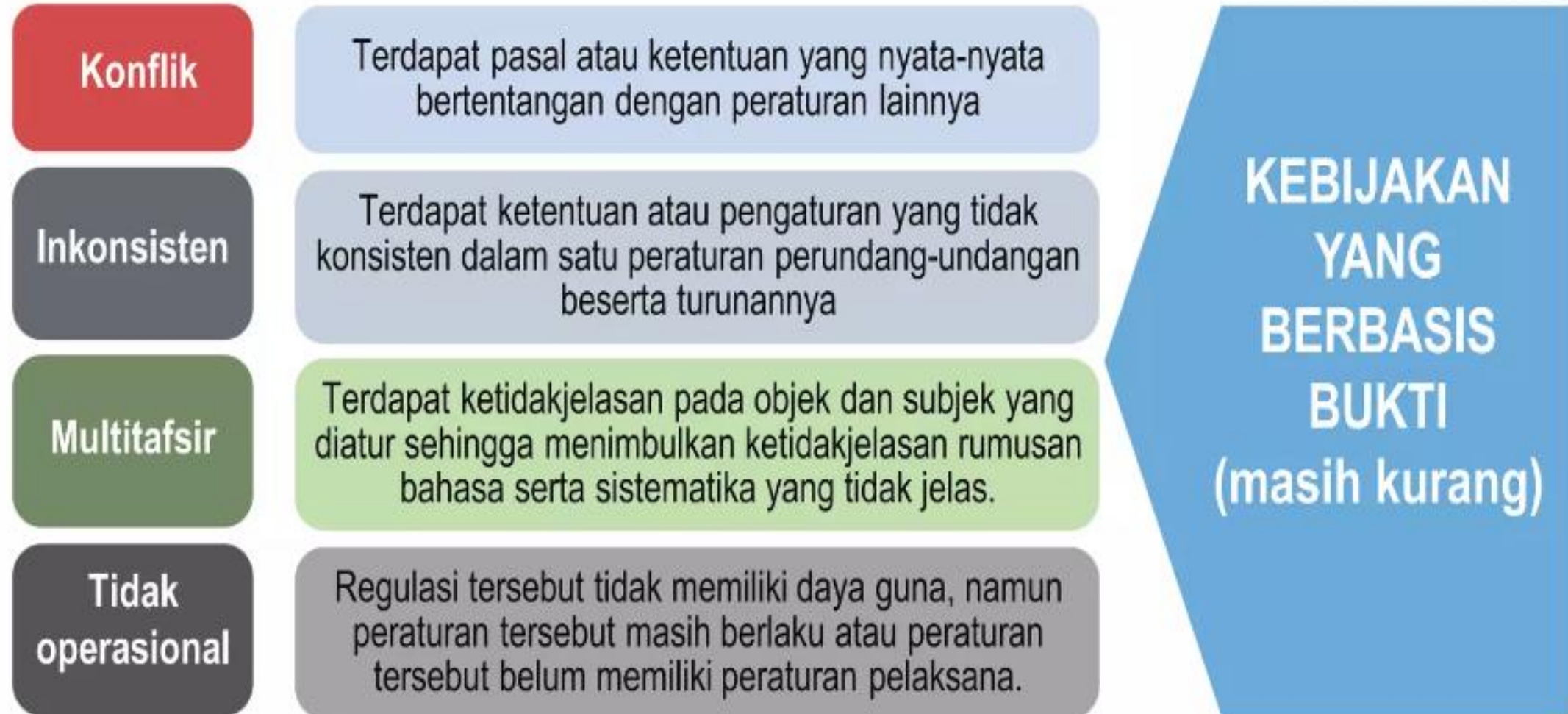
(Skor 60,1)

dari 193 Negara

Area Perbaikan:

- Kualitas SDM sektor publik;
- Kualitas pelayanan dan perumusan kebijakan publik;
- Kredibilitas pemerintah dalam implementasi kebijakan publik.

Beragam Masalah dalam Kebijakan



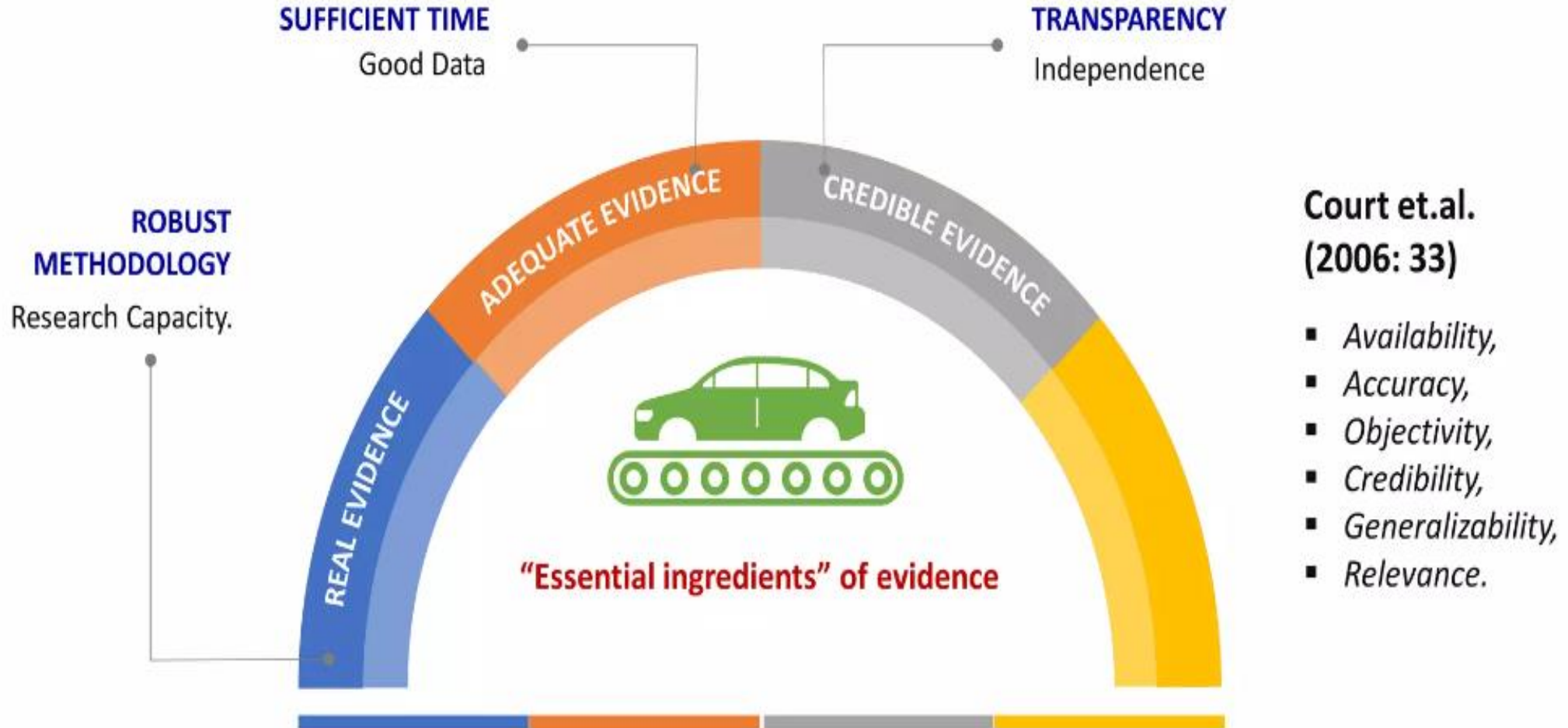
PENERAPAN *EVIDENCE-BASED POLICY MAKING* & KAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Prolog: Sejarah EBP

 Save slide

- Terdapat proposisi bahwa pengetahuan yang handal adalah instrumen untuk mewujudkan kebijakan yang berkualitas. Ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, politik, psikologi dll) berkembang pesat dan ilmuwan sosial terlibat dalam berbagai aktivitas reformasi kebijakan.
- Namun, hasilnya masih belum optimal karena penelitian sosial yang tidak memadai, serta kapasitas implementasi dan koordinasi yang buruk dari lembaga pemerintah. Itulah sebabnya, penggunaan data kuantitatif dan metode eksperimental sangat dianjurkan sebagai sarana untuk memberikan bukti (*evidence*) yang lebih tepat dan andal bagi para pembuat keputusan.

Karakteristik Evidence yang Baik



**Court et.al.
(2006: 33)**

- Availability,
- Accuracy,
- Objectivity,
- Credibility,
- Generalizability,
- Relevance.

Sumber: Banks, 2009

Urgensi Kebijakan **Berbasis Bukti**



Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk mencegah kegagalan kebijakan (policy failures) dan munculnya konsekuensi yang tidak diinginkan, yang biasanya terjadi karena 2 hal:



**ANALISIS YANG TIDAK
AKURAT**



**ANALISIS YANG TIDAK
SELESAI (TIDAK
DILAKUKAN)**

Unintended Consequences of Policy

Kajian kebijakan diperlukan untuk menghindari atau meminimalisir “dampak tak termaksud” atau konsekuensi yang tidak direncanakan (konsep ini salah satunya diperkenalkan oleh [Robert K. Morten](#) dalam tulisannya berjudul *The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action*).

Eastern Economic Journal (2021) 47:206–226
<https://doi.org/10.1057/s41302-021-00187-7>

ORIGINAL ARTICLE

Unintended Consequences: Ambiguity Neglect and Policy Ineffectiveness

Lorán Chollete¹ · Sharon G. Harrison²

Published online: 1 February 2021
© EEA 2021



*Pada tahun 1989, Pemda Mexico City menerapkan kebijakan pengendalian polusi udara dengan melarang para pengemudi mengendarai **satu hari kerja/minggu**. Pelanggarnya dikenakan denda besar.*

*Ternyata, **banyak orang membeli mobil yang lain** – pada umumnya mobil bekas dengan emisi tinggi – hanya untuk menghindari dari pelanggaran terhadap kebijakan tsb.*

*Dalam hal ini, keputusan pengemudi untuk menambah mobil justru **menimbulkan eksternalitas negatif** berupa polusi udara yang semakin parah.*

Idealita vs Realita **Penyusunan Kebijakan**



Policy making is based on
EVIDENCE

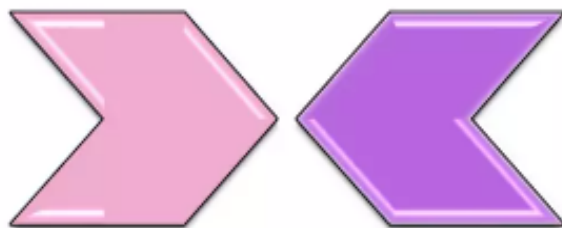


Policy making is based on:

- Intuition
- Common sense
- Experience
- Ideology
- Public opinion
- Political interests that can swing from one end of the spectrum to the other for the sake of rent seeking.

Relasi **Policy Analyst** – **Policy Maker**

Policy Analysts



Policy Makers

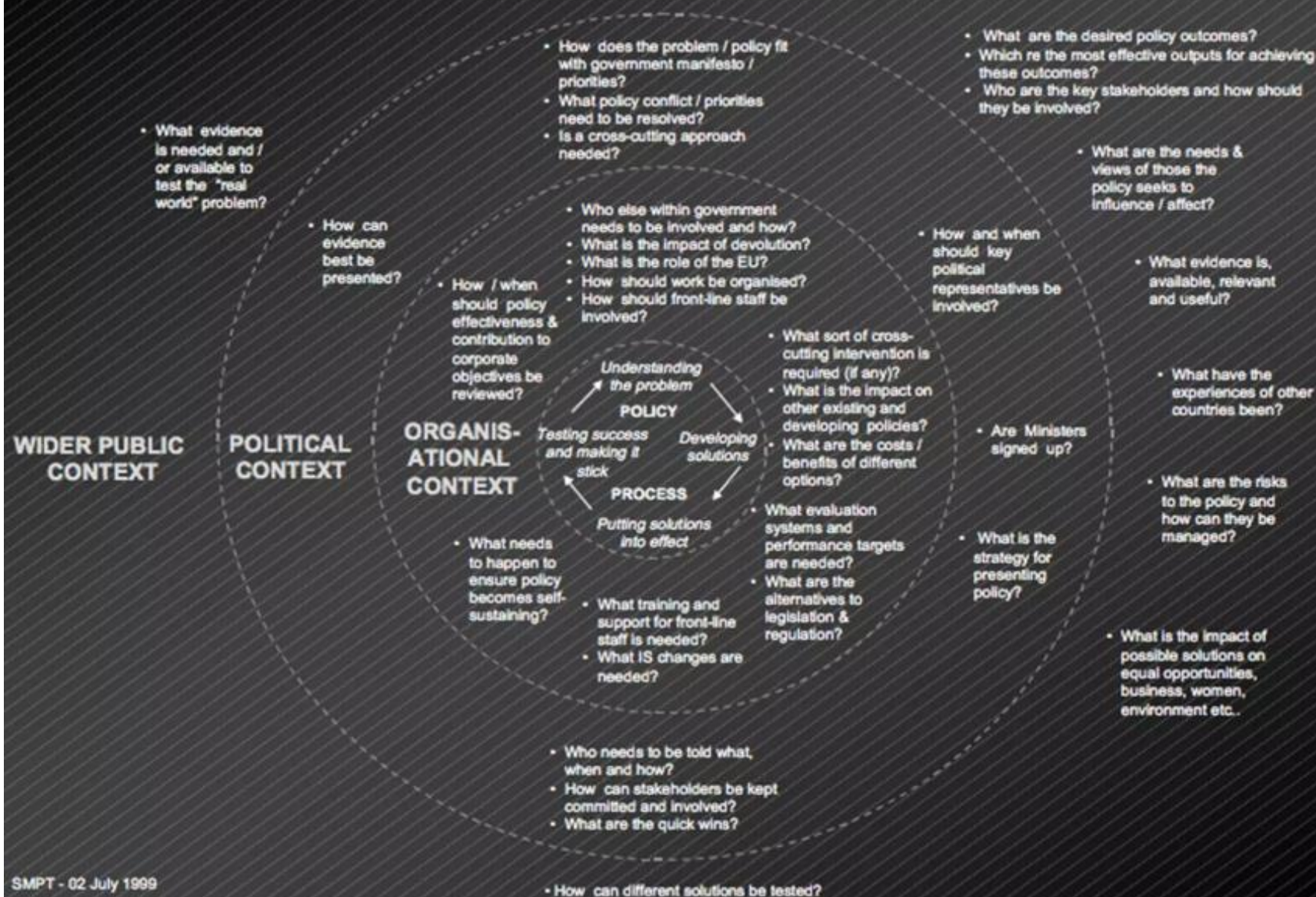
- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
- Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;
- Kedekatan dengan birokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang dari kerja akademis.

***Evidence-
based policy***

- Peneliti kebijakan tidak mengerti detail persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang rumit;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.

Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, *Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek*, Jakarta: LP3ES

The policy process in context



Saya ingin mengakhiri mengambil kebijakan yang berwarna ideologi.

Kebijakan publik dibawah pemerintahan saya **haruslah yang problem solving. Ia harus evidence-based policy. Ia harus kebijakan yang berdasar pada bukti, pada data, dan pada riset.**

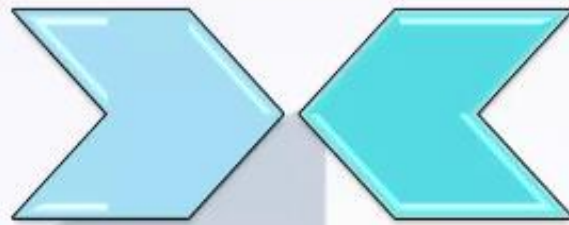
Saya meyakini, **kebijakan publik akan lebih melayani kepentingan masyarakat jika ia bersandar pada prosedur ilmiah, bukan giringan ideologi.**

Tony Blair (PM Inggris, 2 Mei 1997 – 27 Juni 2007)

Sumber: UK Cabinet Office, 1999, *Professional policy making for the twenty first century.* London.

Gap Between Knowledge & Policy, dan Urgensi EBP

Knowledge
(Research)



Policy

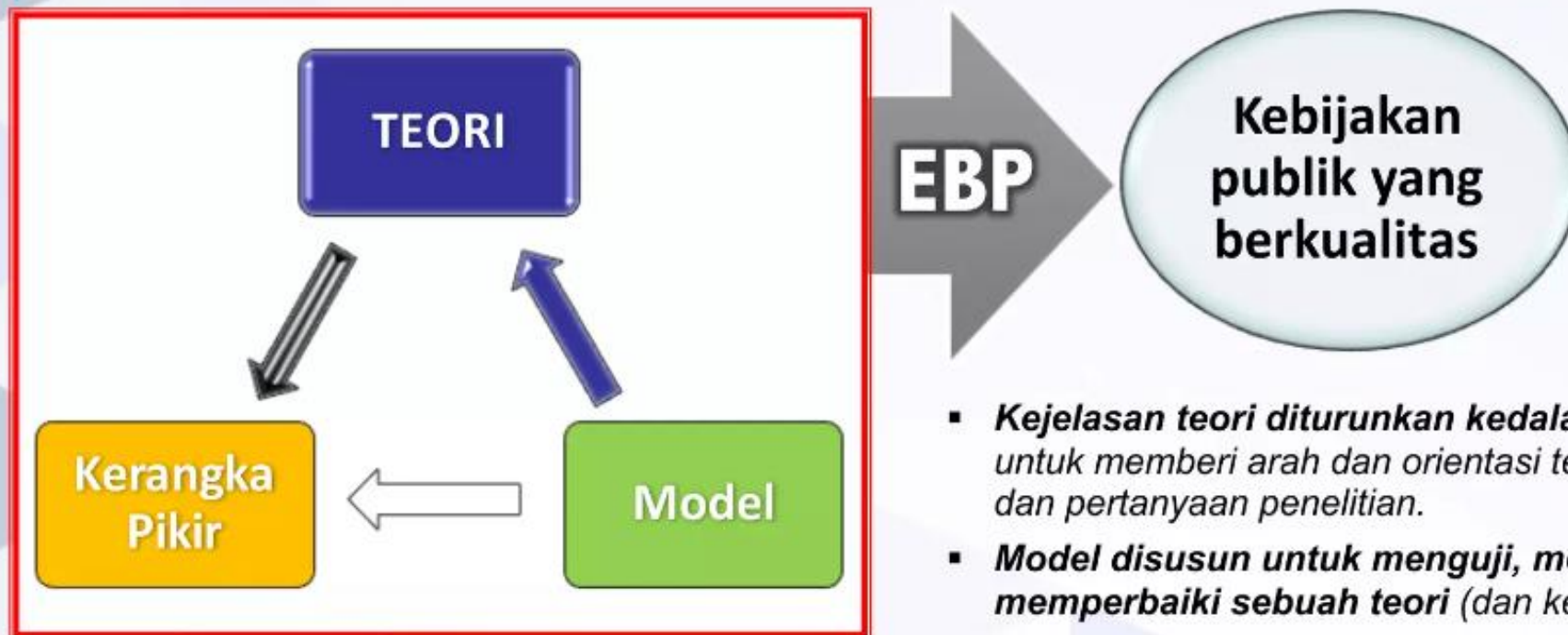
- Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan;
- Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan;

EBP

- Peneliti kebijakan tidak mengerti detail persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik;
- Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak.



EBP sebagai Esensi *Policy Analysis*



Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam analisis kebijakan publik

Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019)

- *Kejelasan teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir, untuk memberi arah dan orientasi terhadap analisis dan pertanyaan penelitian.*
- *Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir).*
- Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat. Namun, teori saja sangat tidak cukup. Ia harus direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar dapat bekerja (*workability*).

EBP: Mengubah Interaksi Pengetahuan-Kebijakan



"You are completely free to carry out whatever research you want, so long as you come to these conclusions."

Power speaks
to truth

(Alison Shaw, 2005)

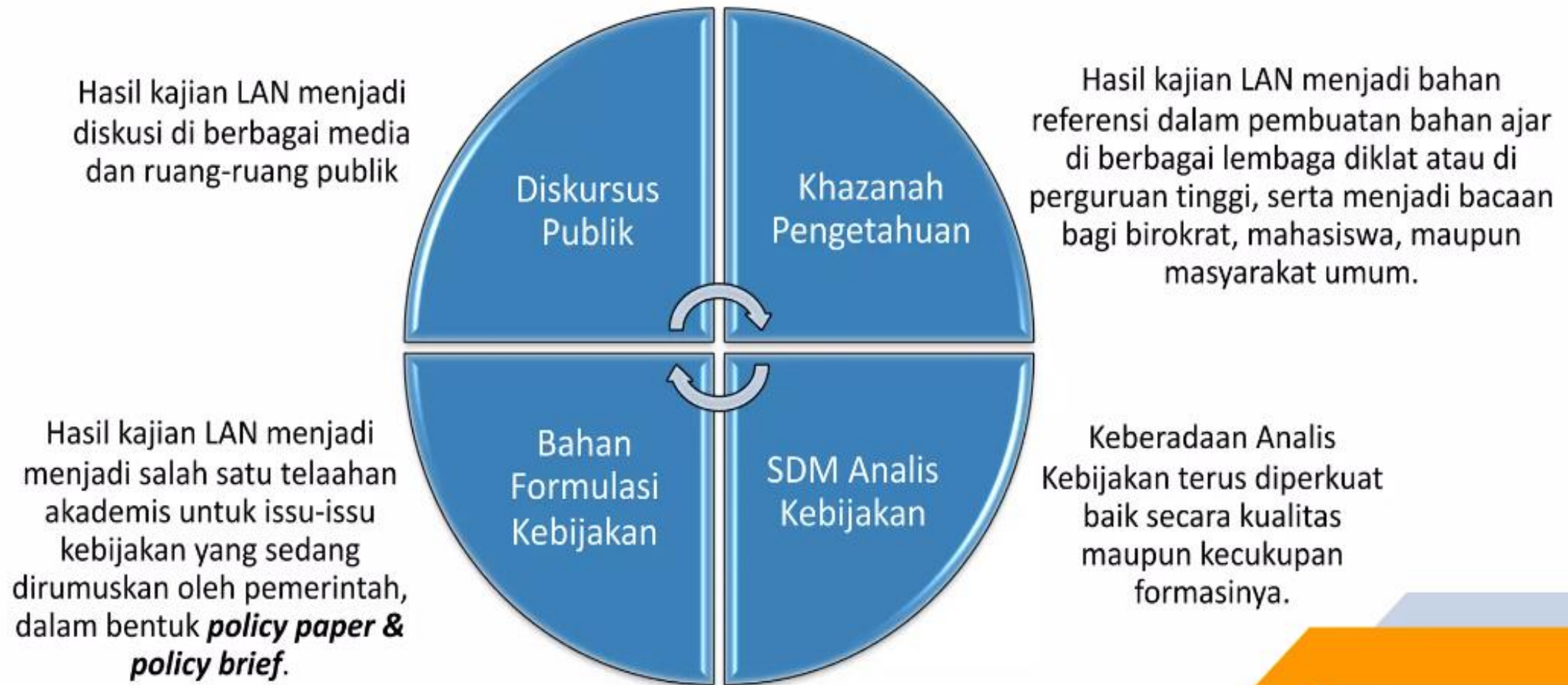


Truth speaks
to power

(Price, 1965)

EBP KETERKAITANNYA DENGAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN (IKK)

1. MEMBANGUN KUALITAS KEBIJAKAN



Epilog

- IKK **hanyalah instrumen** untuk membantu memperbaiki tata kelola atau *business proses* pembuatan kebijakan. Faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas kebijakan adalah **integritas dan komitmen** pembuat kebijakan dalam mendedikasikan kebijakan bagi kemajuan institusi dan negerinya.
- IKK bertujuan membiasakan **(habituasi) praktik baik** dalam perumusan kebijakan publik.
- Skor IKK yang rendah pada tahun tertentu, bukan cerita akhir tentang sebuah instansi/daerah. Pengalaman 2021 harus menjadi ***lesson learned*** untuk membuktikan kualitas kebijakan yang jauh lebih baik pada 2023.
- Kualitas kebijakan **bukanlah tujuan akhir** dari pengukuran IKK. Tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing bangsa terhadap bangsa lain, sekaligus mewujudkan cita-cita nasional dalam UUD 1945.
- Keberadaan **JF Analis Kebijakan perlu didayagunakan** untuk mengawal pelaksanaan IKK di tingkat instansi, sekaligus meningkatkan kualitas kebijakan secara progresif.

IKK dan Indeks RB

IKK sebagai indikator pengukuran capaian Reformasi Birokrasi Nasional pada tataran meso pada sasaran Birokrasi yang Kapabel, sesuai PermenPAN 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dengan target Persentase kementerian/lembaga/pemda dengan IKK baik sebesar 100% pada tahun 2024

**Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020-2024
pada Program/Area Perubahan:
Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan**

Indeks Reformasi Hukum

- Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup instansi pemerintah (menghilangkan overlapping peraturan);
- Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi;
- Penguatan sistem regulasi nasional lingkup instansi pemerintah;

Indeks Kualitas Kebijakan

- Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan;
- Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun

Latar Belakang IKK

Kualitas kebijakan masih kurang baik, tumpang-tindih, tidak berpihak pada publik, minim bukti (tidak *evidence-based*).

2005-2015 terdapat 41.223 regulasi di pusat & daerah berpotensi tumpang tindih (Bappenas, 2015).
Pembatalan menyelesaikan masalah?
Perlu perbaikan dari hulu s.d hilir kebijakan!

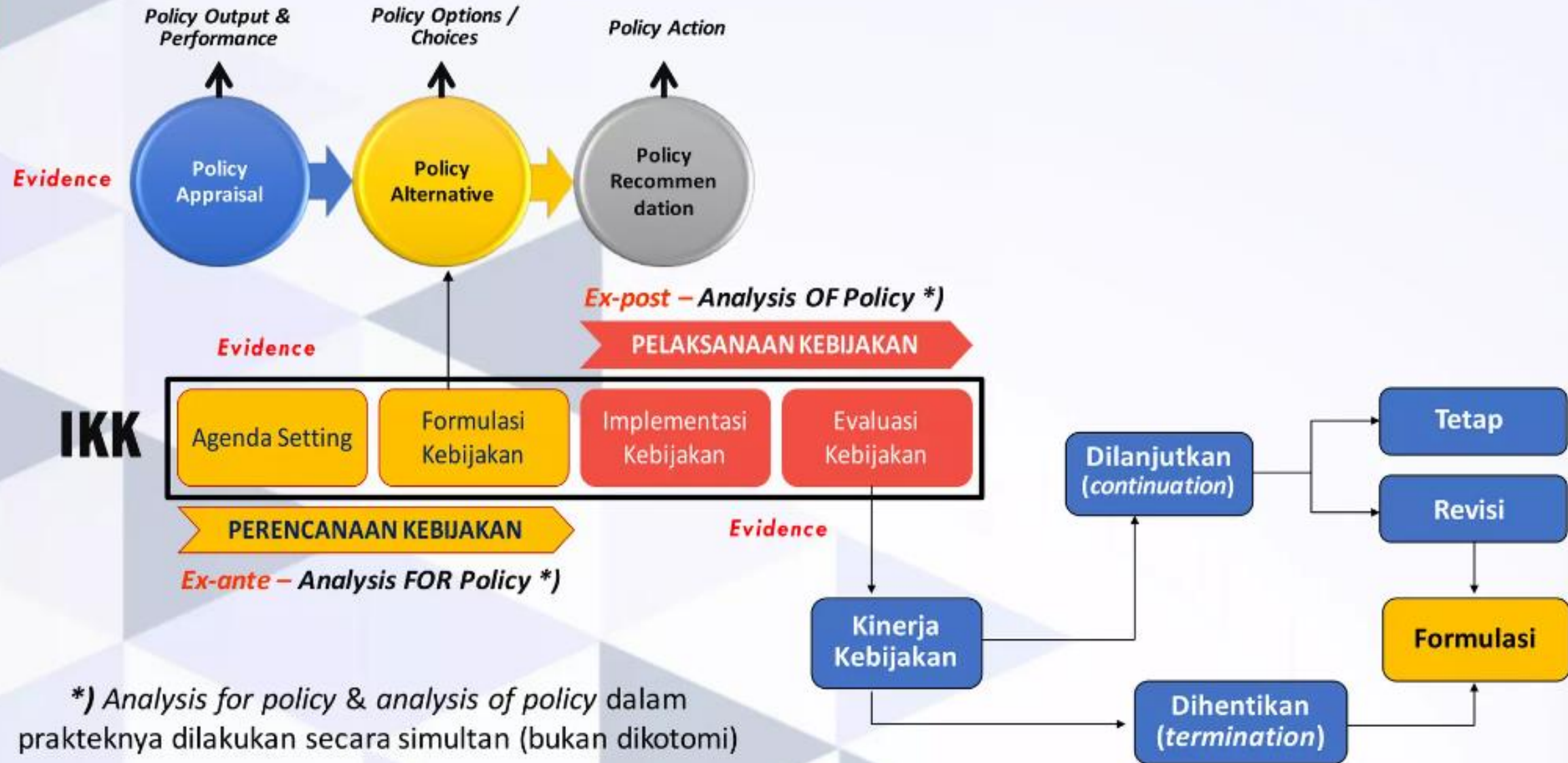
IKK

IKK telah diadopsi sebagai salah satu indeks pengukuran capaian RB 2020-2024 oleh Kementerian PAN-RB sesuai PermenPAN-RB No. 25/2020

Kegiatan Level Mikro RB 2020-2024 dengan kegiatan: (a) perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting & formulasi kebijakan; (b) evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun



EBP & Keterkaitannya dengan IKK



Framework **IKK**



Dimensi IKK

60 FORMULASI KEBIJAKAN

- a. Berorientasi ke depan
- b. Outward Looking
- c. Berbasis data
- d. Inovatif
- e. Compliance

40 AGENDA SETTING

- a. Identifikasi Masalah
- b. Kajian Terhadap Isu – Isu Aktual
- c. Konsultasi Publik Terhadap Isu dan Assesment yang Dilakukan

50 PERENCANAAN KEBIJAKAN

DIMENSI IKK

50 PELAKSANAAN KEBIJAKAN

60 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- a. Pengorganisasian
- b. Komunikasi Kebijakan
- c. Pelaksanaan Monitoring

40 EVALUASI KEBIJAKAN

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Dampak
- d. Kesesuaian nilai

EKSISTING

- a. Berorientasi ke depan
- b. Outward Looking
- c. Berbasis data
- d. Inovatif

- a. Identifikasi dan Validasi Isu
- b. Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Isu

REVISI

- a. Pengorganisasian
- b. Komunikasi Kebijakan
- c. Monitoring Kebijakan

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Dampak dan Kemanfaatan
- d. Kesesuaian Nilai